

Ali Usman, Ketua PATAKA

Implementasi Kebijakan Revisi Data Jagung: Pengadaan, Pengelolaan dan Penyaluran Cadangan Jagung Pemerintah

DASAR PEMIKIRAN

Polemik harga jagung selalu menuai kritik publik, tak terkecuali peternak ayam petelur (layer) yang membentangkan poster kearah muka Presiden RI Joko Widodo saat kunjungan kerja ke Blitar Jawa Timur. Memasuki pekan kedua harga jagung melambung kembali di angka Rp 6.200 per kilogram, sebelumnya pada April 2021 harga jagung tembus di angka Rp 7.000 per kilogram. Padahal harga jagung menurut acuan Permendag RP 4.500 per kilogram dengan Kadar Air (KA 15%). Keresahan peternak ayam akan naiknya harga jagung selalu berulang setiap tahun pada periode tertentu. Indikasinya karena langkanya stok di pasaran sehingga membuat peternak mandiri broiler dan layer selalu kelimpungan karena usahanya semakin ditekan merugi.

KAJIAN EMPIRIS

Harga jagung melambung tidak sesuai klaim Kementerian Pertanian bahwa jagung surplus 2.37 juta ton pada September 2021. Tapi faktanya harga jagung melambung di berbagai daerah, terutama di pulau Jawa. Surplus jagung tidak mendasar karena faktanya harga jagung naik di peternak dan pabrik pakan ternak (feedmill) yang mayoritas pengguna jagung lokal. Tapi untuk stabilisasi harga jagung GPMT masih impor gandum sebanyak 300 ribu ton bertahap di 2021 melalui PT Berdikari. Hal ini menjawab langka dan mahalnya jagung lokal sejak April lalu 2021. Impor jagung ditutup tetapi impor gandum masih terjadi.

REKOMENDASI KEBIJAKAN

1. Pemerintah perlu menyerahkan data jagung kepada BPS supaya dikoreksi berkala berdasarkan metode Kerangka Sampel Area (KSA). Sehingga BPS dapat menganali-

- sis data jagung berbagai faktor baik sifatnya produksi maupun permintaan sehingga diharapkan satu data jagung dan dapat dipertanggungjawabkan ke publik.
2. Penugasan Cadangan Jagung Pemerintah (CJP) oleh Bulog, idealnya 3 bulan menjelang panen raya untuk penyerapan dan ketersediaan jagung. Tentunya didasari oleh efisiensi Ketika CJP terpaksa untuk importasi.
3. Kementan perlu mendukung untuk segera mengisi Gudang Bulog sehingga Bulog bisa segera menjalankan tugasnya untuk memasok jagung ke peternak rakyat.
4. Dalam jangka panjang CJP harus segera ditetapkan jumlah dan captive marketnya. Sehingga ketersediaan jagung sifatnya tidak seperti pemadam kebakaran.
5. Pemerintah perlu menetapkan regulasi stabilisasi perunggasan diantaranya pengakuan mengenai HPP telur, HPP Jagung dan HET jagung.
6. Pemerintah perlu membangun korporasi petani agar peternak sebagai buyer dengan skala kecil bisa disediakan melalui korporasi petani agar volume bisa masuk dan berkelanjutan.
7. Pemerintah perlu melakukan buka tutup keran impor, sebab kurang tepat jika substitusi impor dilakukan melalui gandum. Pasalnya selamanya Indonesia tidak akan memproduksi gandum baik namun jagung berpotensi ditingkatkan kuantitas dan kualitasnya.
8. Pemerintah perlu menjamin ketersediaan jagung agar jangankan sampai terjadi aksi pemborongan jagung oleh pemain besar.
9. Pemerintah perlu memperhitungkan waktu importasi, sehingga tidak terjadi lagi Bulog melakukan impor jagung dengan harga yang baik disaat waktu yang tidak tepat. Dimana jagung lokal sudah mulai banyak, impor datang sehingga nyaris tidak dikonsumsi oleh peternak maupun pabrik pakan.
10. Diharapkan pemerintah dapat membuat regulasi untuk stabilisasi perunggasan. Agar HET telur diterbitkan pemerintah melalui masukkan peternak. Kondisi ternak layer kelebihan 5% dapat mempengaruhi harga pasar penjualan telur sampai 40%.
11. Penting pemerintah pusat, daerah dan lembaga terkait mengkoordinasikan persoalan kelangkaan jagung supaya peternak dan feedmill selalu nyaman dalam berusaha. Jika surplus, pemerintah menyarankan pengepul untuk melepaskan stok jagung supaya harganya stabil.